

**TITIK SINGGUNG SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS (UUJN) DENGAN KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



Oleh:

KRISNA ARIF FIRMANSYAH

NIM. 12223079

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2026

TESIS

**TITIK SINGGUNG SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS (UUJN) DENGAN KODE ETIK NOTARIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah Direvisi

Pada Tanggal 15 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. KHUSNUL YAQIN, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SEMINARKAN
PADA TANGGAL : 10 Februari 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. KHUSNUL YAQIN, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

The signature of Dr. HABIB ADJIE is a stylized, cursive handwritten mark in black ink, positioned over the official stamp of the Faculty of Law at Universitas Narotama.

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

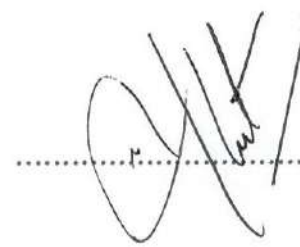
TESIS

PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum 

Anggota : Dr. KHUSNUL YAQIN S.H., M.Hum 

: Dr. MOH. SALEH S.H., M.H. 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



KRISNA ARIF FIRMANSYAH
NIM : 12223079

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kedua instrumen tersebut sama-sama mengatur perilaku notaris serta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Namun, dalam praktik, irisan pengaturan antara UUJN dan Kode Etik Notaris kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penjatuhan sanksi ganda terhadap satu perbuatan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji titik singgung sanksi dalam UUJN dan Kode Etik Notaris serta menelaah pemenuhan prinsip keadilan dalam pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua lembaga tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan koordinasi yang lebih tegas agar penjatuhan sanksi terhadap notaris dapat dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Notaris, Sanksi, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Keadilan.

ABSTRACT

A notary, as a public official, is required to comply with both the Law on Notary Position (UUJN) and the Notary Code of Ethics. These two regulatory regimes govern notarial conduct and impose sanctions for violations. However, in practice, the overlap between these regulations often leads to overlapping authority and the potential imposition of multiple sanctions for the same act. This research examines the intersection between sanctions under the Law on Notary Position and the Notary Code of Ethics, as well as the fulfillment of the principle of justice in the imposition of sanctions by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches.

The findings show that the absence of clear coordination between the two institutions creates legal uncertainty and risks disproportionate sanctions. Therefore, clearer regulation and coordination are needed to ensure that sanctions imposed on notaries are fair, proportional, and consistent with the principle of justice.

Keywords: Notary, Sanctions, Law on Notary Position, Notary Code of Ethics, Justice.

MOTTO

“Berubahlah, namun dengan perlahan, karena arah lebih penting daripada kecepatan.”

“Berbiasalah, Berbahagialah.” -wiranagara



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"TITIK SINGGUNG SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN) DENGAN KODE ETIK NOTARIS"**. Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester prodi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penulisan tesis ini. Terimakasih saya kepada :

1. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas.
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
4. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H selaku Ketua Dewan Tesis Universitas Narotama.
5. Dr. Tahegga Primananda Al Fath, S.H., M.H selaku Sekretaris Dewan Tesis Universitas Narotama.
6. Dr. Khusnul Yaqin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Saya.
6. Para Staff dan Jajaran Fakultas Hukum Program Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
7. Teruntuk kedua Orang Tua saya yang telah mendukung secara materiil maupun imateriil.

8. Teruntuk Dyah Rizqy Romadhoni, terimakasih atas semangat dan dukungannya.
9. Untuk Adik saya Dimas Tri Atmaja, terimakasih atas dukungannya.
10. Teman – teman kantor Notaris Rudy Effendi, S.H yang sudah memberikan dukungan dan semangat, semoga sukses selalu.
11. Teman – teman rumah Perum Patriot Mas dan Perum Citra Medayu G-13 yang telah membantu dan memberikan dukungan, semoga dapat menggapai apa yang dicita-citakan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah mendoakan dan mendukung penulis sampai dengan selesai skripsi ini dan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhaanahu Wa Ta’aala; dan
13. Terimakasih kepada masa lalu, karena-nya penulis lebih berhati-hati dalam menyeleksi/meneliti dan lebih berjaga-jaga agar akhirnya tesis ini bisa terkenang bahagia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam isi maupun dalam susunan kata. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Penulis

Krisna Arif Firmansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
13.1.....	Lata
r Belakang Masalah	1
13.2.....	Ru
musan Masalah	5
13.3.....	Tuju
an dan Manfaat Penelitian	5
13.3.1.....	Tuju
an Penelitian	5
13.3.2.....	Man
faat Penelitian	6
13.4.....	Orig
inalitas Penelitian	6
13.5.....	Tinj
auan Pustaka	8
13.5.1.....	Not
aris	8
13.5.2.....	Ko
de Etik Notaris	10
13.5.3.....	Sa
nksi	11
13.5.4.....	Un
dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	15

13.5.5.....	Te	
ori Kemanfaatan		17
13.5.6.....	Te	
ori Keadilan Bermartabat		18
13.6.....	Me	
tode Penelitian		19
13.6.1.....	Tip	
e Penelitian		19
13.6.2.....	Pe	
ndekatan Masalah		19
13.6.3.....	Su	
mber Bahan Hukum		20
13.6.4.....	Prose	
dur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum		21
13.6.5.....	Anali	
sa Bahan Hukum		21
13.7.....	Siste	
matika Penulisan		22
BAB II.....		24
TITIK SINGGUNG ANTARA SANKSI DALAM UUJN DENGAN SANKSI		
DALAM KODE ETIK NOTARIS		24
2.1. Notaris Yang Mendapatkan Sanksi		24
2.2. Sanksi Yang Diatur Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik bagi		
Notaris		26
2.3. Manfaat Sanksi bagi Notaris		33
BAB III		46
PEMBERIAN SANKSI DEWAN KEHORMATAN DAN MAJELIS		
PENGAWAS NOTARIS DALAM MEMENUHI PRINSIP Keadilan.....		46
3.1. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Kehormatan		46

3.2. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris	48
3.3. Prinsip Keadilan Atas Sanksi Yang Diberikan Oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris	49
BAB IV	72
PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

